

#bersihkanindonesia



Lembar Fakta untuk Conference of The Parties ke-27 (COP 27)

The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)

BAGAIMANA MEGAPROYEK IBUKOTA BARU INDONESIA MENGUNDANG BENCANA IKLIM DAN MENGHANCURKAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN ADAT SUKU BALIK DI KALIMANTAN TIMUR



DAFTAR ISI

I. Latar Belakang dan Pengantar	Hal 1
II. Siapa Untung di Ibukota Baru	Hal 2
III. Hubungan Kanibalisme, Wilayah yang dikorbankan demi material dan energi di Ibukota Baru	Hal 6
IV. Bencana Iklim, Perempuan dan Masyarakat Adat Suku Balik di Ibukota Baru	Hal 8
V. Peran Militer di balik Ibukota Baru	Hal 11
VI. Desakan dan Tuntutan	Hal 13

I. LATAR BELAKANG DAN PENGANTAR

PEMERINTAH Indonesia saat ini sedang menyiapkan gimmick pada Conference of The Parties ke-27 (COP 27), The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di Mesir, November ini. Mereka mengubah target penurunan emisi gas rumah kaca yang semula 29 persen menjadi 31,89 persen melalui upaya sendiri, dan sebesar 41 persen meningkat menjadi 43,20 persen melalui dukungan internasional dalam enhanced nationally determined contribution (ENDC).

Presiden Joko Widodo mengklaim mega proyek Ibukota baru bagian dari solusi mengejar target net zero emissions, para penyokongnya di kantor staf kepresidenan membual bahwa teknologi hijau seperti pembangkit terbarukan dan transportasi berbasis baterai hingga pembangunan rendah karbon akan memperkuat visi smart, green and forest city yang disematkan pada megaprojek ibukota baru ini.

Namun di tapak, hal terjadi sebaliknya, “urbanisme” baru ini justru mendorong Indonesia jatuh lebih dalam pada jebakan ekstraktivisme dan mengundang bencana iklim. Perusakan oleh industri ekstraktif akan meningkat dan meluas.

Demi memasok kebutuhan material dan energi akan lebih banyak lagi penggalian pasir, karst dan batu material. Pesisir dan pulau-pulau kecil akan dibongkar dan sumber-sumber airnya diracuni untuk Nikel, bahan baku baterai kendaraan listrik. Bersamaan batubara akan tetap dibakar untuk menggerakkan smelter-smelternya. Begitu juga perampasan lahan untuk proyek energi dan ekstraksi air melalui bendungan raksasa.

Melampaui itu, di atas 256 ribu luas konsesi megaprojek ibukota ini berdiri ruang hidup yang menyejarah masyarakat adat suku Balik bersama masyarakat lokal lainnya, mereka akan menjadi saksi bagi tamatnya ruang hidup tersebut untuk kesekian kalinya. Gempuran ini sudah dan masih melahirkan kecemasan dan ketakutan bahkan juga menciptakan kerusakan dan kehilangan yang tidak bisa dihitung dan digantikan, termasuk pada masyarakat dan perempuan suku Balik yang tinggal di bentang ruang hidup Sungai Sepaku yang juga ditetapkan sebagai Ring satu dan pusat pembangunan Ibukota baru ini. Ladang, kebun, kuburan leluhur digusur bahkan pengetahuan dan penghidupan mereka seperti anyaman atap nipah akan lenyap beriringan dengan proyek memotong dan membendung sungai di sana.

Lembar Fakta yang diproduksi oleh Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur ini akan menguraikan secara singkat untuk khalayak yang lebih luas, silahkan disebar.

Mareta Sari

Dinamisator JATAM Kalimantan Timur

II. SIAPA UNTUNG DI IBUKOTA BARU

SUDAH tiga tahun sejak pertama kali ide pemindahan Ibukota ini dilontarkan pada 29 April 2019, saat ini ambisi ini masih dipaksakan oleh pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Meski berhadapan dengan krisis akibat Pandemi Covid, meroketnya Hutang, Inflasi karena belum pulihnya ekonomi masyarakat ditambah lagi dengan ancaman Resesi global dampak pendudukan Rusia di Ukraina, belum cukup menghentikannya.

Pemerintah memaksakan pengesahan Undang-undang Ibukota Negara meskipun protes muncul akibat proses penyusunannya tidak partisipatif dan secepat kilat, hanya 42 hari. Pada awalnya pemerintah Indonesia menyatakan luasan lahan yang akan dialokasikan sebagai Ibukota Baru seluas 180.965 hektar pada 2019, luasan ini kemudian diubah menjadi 256.142 hektar setahun setelahnya, hal ini menunjukkan gonta-ganti alokasi luas lahan Ibukota baru ini tanpa berbasis kajian dan kebutuhan. Luas alokasi ini setara enam kali luas Jakarta saat ini. Perluasan diduga untuk mengakomodasi masuknya konsesi dan menguntungkan penguasaan lahan oleh sejumlah oligarki lainnya, salah satu diantaranya adalah Luhut Panjaitan (menteri koordinator investasi kabinet Jokowi).

Selain Luhut, sudah ada 162 konsesi komersial kehutanan, perkebunan skala besar mulai sawit hingga hutan tanaman industri bahkan Batubara, yang dikuasai oleh Hashim Djojohadikusumo--saudara kandung Prabowo Subianto (menteri pertahanan kabinet Jokowi), Sukanto Tanoto hingga Luhut Panjaitan dan Reza Herwindo--anak dari Setya Novanto (Laporan Ibukota Baru Buat Siapa, 2019). Karena itu sejak awal transaksi akan terjadi bukan kepada rakyat tetapi pada pemilik konsesi. Korporasi punya kesempatan sejak dini untuk memastikan investasi mereka aman dan bersiasat dengan rencana hadirnya mega proyek Ibukota baru ini.





GAMBAR 1, Koneksi Hutan Tanaman Industri milik PT ITCI Hutani Manunggal yang akan menjadi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibukota Baru milik Taipan Sukanto Tanoto, Sumber Foto ; JATAM Kaltim, 2021

Ruang gelap lainnya adalah penyediaan lahan yang akan diperoleh melalui pelepasan kawasan hutan dan pengadaan lahan. Sebagian koneksi hutan produksi ini dikuasai oleh oligarki dan Industri, diantaranya adalah International Timber Corporation Indonesia (ITCI) yang 41 ribu hektar ditargetkan akan dilepas statusnya,

sementara pengadaan lahan akan melalui mekanisme jual beli, hibah, pelepasan sukarela dan tukar menukar atau yang dapat diterjemahkan sebagai “Tukar Guling”, Tukar menukar kawasan hutan atau tukar guling merupakan salah satu dari sekian banyak titik potensi korupsi yang ada di sektor sumber daya alam selama ini di Indonesia.

Selain itu selama ini pemerintah menyatakan lahan-lahan itu milik negara dan bisa diambil kapan saja.

Namun, dapatkah begitu saja pemegang izin rela untuk angkat kaki?

Apa kompensasi yang akan didapat korporasi pemegang izin di sana?



GAMBAR 2, Ilustrasi Oligarki Bisnis yang akan diuntungkan dan para steering committee (SC), Sumber ; Laporan Ibukota Baru Buat Siapa?, JATAM 2019.

Bukan cuma ancaman di darat, Kehadiran IKN akan mengakibatkan perampasan ruang hidup masyarakat pesisir dan nelayan tradisional di dua wilayah yakni nelayan tradisional Kabupaten PPU dan nelayan tradisional Kota Balikpapan. Lebih dari 10 ribu 55 nelayan yang menggantungkan ekonominya pada sumber daya kelautan dan perikanan khususnya di Teluk Balikpapan. Hulu Teluk Balikpapan turut tercakup dalam wilayah IKN atau ring dua yang mengancam keberadaan ekosistem mangrove. Ekosistem ini membentang sepanjang 17 km dari Kecamatan Balikpapan Barat hingga pesisir teluk di wilayah Kecamatan Penajam.

Mengenai pembiayaan, Jokowi menyatakan pembiayaan akan mengandalkan 20 persen dana pemerintah dan 80 persen dari investor. Pemerintah mengklaim bahwa para investor sudah mengantri, diantaranya Uni Emirat Arab, Jokowi bahkan menjadikan Muhammad Bin Zayd (MBZ) pemimpin tertinggi saat ini di UEA menjadi steering committee (SC) dari kepantian besar megaprojek ini,

mereka melakukan diplomasi “nama jalan”, nama MBZ terpampang menjadi nama Jalan tol layang Cikampek di Jakarta dan sebaliknya di Abu Dhabi nama Jokowi menjadi nama jalan di sana.

Jokowi juga menjadikan Masayoshi Son (Softbank) dan Tony Blair sebagai SC. Meskipun tahun lalu karena kondisi keuangan, Masayoshi Son dan Softbank telah mundur. pada Maret 2022 lalu, Pemerintahan Joko Widodo tidak peduli meskipun MBZ terlibat dalam skandal mega korupsi perdana menteri Malaysia Najib Tun Razak, begitu juga Tony Blair yang pernah terlibat dalam skandal Invasi perang Irak pada 2003, hingga dilabeli sebagai penjahat perang

Baru-baru ini untuk memastikan investor datang, Jokowi menyelenggarakan pre-market sounding lbukota baru, ia berperan bak sales marketing, mengobrol berbagai insentif pajak investasi, seperti hak guna usaha dan bangunan masing-masing 95 tahun dan 80 tahun lamanya, Tax holiday selama 30 tahun hingga diskon insentif Tax Deduction 350 persen.

III. HUBUNGAN KANIBALISME, WILAYAH YANG DIKORBANKAN DEMI MATERIAL DAN ENERGI DI IBUKOTA BARU

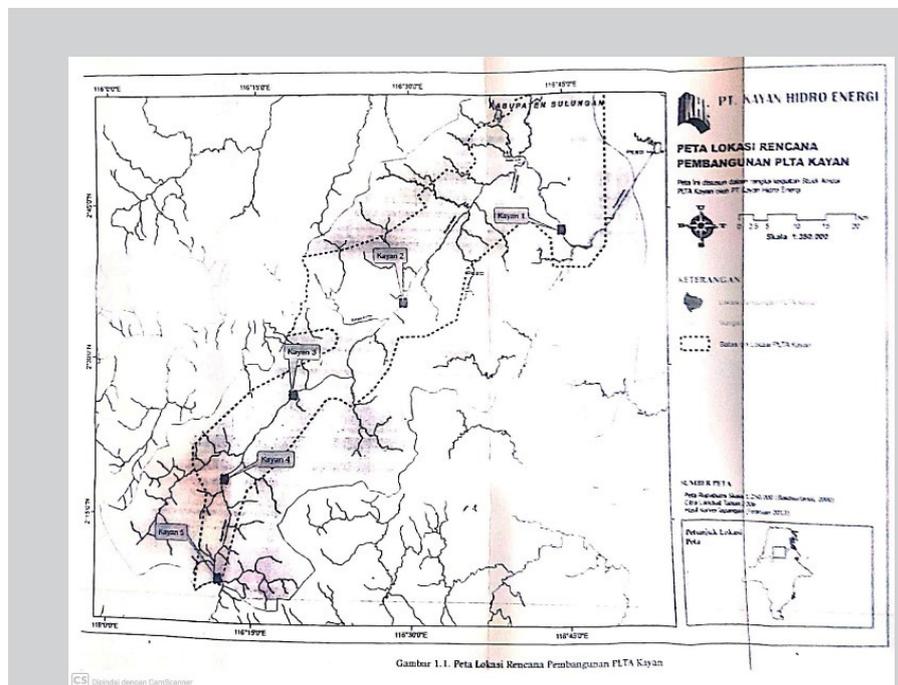
KARAKTER ekstraktif dan pemangsa dari megaprojek Ibukota Baru harus dilihat sebagai sebuah daur proses ekstraksi dari penggalian material dan energi di lokasi tambangnya, pengangkutan melewati jalan darat dan perairan sampai ke konsumsinya baik di dalam pulau ataupun pulau

lainnya. Ini memungkinkan untuk melihat bagaimana penduduk di wilayah dan pulau lain “mensubsidi” dan “dikorbankan” untuk memenuhi bahan baku dan infrastruktur megaprojek ini, meletakkan bingkai yurisdiksi penderitaan dan kehilangan yang lebih besar, berikut di antaranya;

PLTA Kayan Kalimantan Utara, Tenggelamkan Kampung dan Masyarakat Adat untuk Melistriki Ibukota Baru

Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Sungai Kayan, Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara pembangkit terbesar Se Asia Tenggara akan mensuplai kebutuhan energi listrik Kawasan Industri Kalimantan Utara dan konsesi Ibukota Negara Baru di Kalimantan Timur. Proyek akan dikerjakan oleh PT. Kayan Hydro Energy yang juga bekerja sama dengan Sumitomo Corp Jepang terdiri dari 5 bendungan dengan luas konsesi 184. 270 hektar berkapasitas 9.000 MW.

Dalam dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT. PLN (Perseero) 2021-2030 menyebutkan pembangunan PLTA yang menggunakan Sungai Kayan. PLTA ini menggunakan jaringan transmisi backbone Kalimantan yang akan disalurkan ke beberapa gardu induk untuk kebutuhan IKN. Paparan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang menyebutkan PLTA di Kalimantan Utara dibangun untuk mensuplai kebutuhan



Gambar 1.1. Peta Lokasi Rencana Pembangunan PLTA Kayan

energi listrik IKN.

Terdapat 6 kampung yang akan menjadi tumbal dari proyek PLTA Sungai Kayan ini, yaitu Desa Long Lejuh, Desa Long Peso, Long Bia, Long Pelban di tepian Sungai Kayan juga terdapat situs purbakala di Desa Long Pelban, Muara Pangiang dan Long Lian. Akan ada 2 kampung yang akan direlokasi atau digusur yakni

kampung Long Pelban dan Long Lejuh. terdapat situs penting masyarakat adat Bulungan yang juga terancam makam keramat (Salung) di Desa Muara Pangean, Desa Long Lejuh, Desa Long Pelban, dan Desa Long Lian. juga terdapat peninggalan sejarah Bulungan “Lahai Bara” semacam makam atau situs yang dikediratkan di Desa Long Pelban.

Pesisir Sulawesi Barat dan Tengah dikorbankan untuk bahan material infrastruktur Ibukota Baru



GAMBAR 4, Potret kerusakan pesisir Sulawesi Tengah akibat Penambangan Batu dan Pasir, sumber foto: Jatam Sulawesi Tengah

Selain Sungai Kayan untuk kebutuhan listrik, ekstraksi material juga dilakukan di Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah untuk kebutuhan batu gajah untuk pembangunan infrastruktur IKN. Batu gajah didatangkan dari Sulawesi Barat yang bekerja sama dengan PT Sulbar Malaqbiq dengan produksi 20 juta kubik diangkut dengan kapal ke Penajam Paser Utara (PPU) dan Balikpapan melalui pelabuhan Palipi.

Sulawesi Tengah juga akan terancam tambang untuk dibongkar material batu gajahnya. Pemerintah Provinsi Kaltim telah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulteng terkait pembangunan daerah melalui Memorandum of Understanding (MoU) yang dilaksanakan di Kantor Gubernur Kaltim saat Gubernur Sulteng Rusdi Mastura berkunjung ke Kaltim pada 9 September 2021.



GAMBAR 5, Tumpukan batu gajah di lokasi proyek bendungan Sepaku Semoi, sumber foto: JATAM Kalimantan Timur, 2022

IV. Bencana Iklim, Perempuan dan Masyarakat Adat Suku Balik di Ibukota Baru

SALAH satu proyek yang masuk dalam Ibukota baru lainnya adalah pembangunan Bendungan Intake Sepaku. Proyek ini dibangun dengan konsep Bendung Gerak (obermeyer) dan memiliki lebar bendungan 117,2 meter, serta tinggi bendungan mencapai 2,3 meter. Pembangunan Bendungan Sepaku-Semoi bersama Bendungan Intake Sepaku ini diproyeksi akan melayani 1,5 hingga 1,9 juta penduduk baru kawasan Inti Ibukota.

Siapa yang dikorbankan, Salah satunya perempuan suku Balik, Bece', sejak 5 bulan terakhir, ia dan lebih dari 50 keluarga suku Balik terdampak pembangunan intake Sepaku. Antara lain, kesulitan mendapatkan air untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, air yang dulu gratis dari Sungai kini harus membeli air galon, keluarganya harus menunggu pembagian air dari pihak kontraktor proyek Bendungan akibat sungai Sepaku yang tidak bisa lagi diakses.



Selain sebagai sumber air, Sungai Sepaku juga merupakan salah satu jalur transportasi dan tempat sumber protein warga. Biasanya, sungai bagi Warga Suku Balik adalah “jalur” mencari Daun Nipah untuk dianyam menjadi atap Tradisional. Sungai juga sumber Ikan Baung, Nila dan Gabus, ikan-ikan paling yang paling laku dijual dan dikonsumsi oleh mereka.

Namun semenjak Sungai Sepaku ditutup dan menjadi lokasi proyek Bendungan Intake, maka masyarakat tidak dapat lagi menurunkan perahu

ke Sungai untuk mencari Ikan dan daun-daun Nipah. Bahkan, dampak lainnya adalah Kala sukacita Lebaran Idul Adha 2022 mestinya dirayakan, keluarganya malah kebanjiran.

Sedimentasi, peracunan sejak lama sungai ini oleh konsesi hutan Industri, International Timber Corporation Indonesia (ITCI) yang sudah lama membebani bentang hulu dan aliran Sungai Sepaku telah ikut menyumbang perusakan Bentang Sungai Sepaku ditambah lagi dengan Proyek Infrastruktur Bendungan Intake Sepaku untuk Ibukota Baru saat ini.

Sungai Dipotong, Nipah tak Tergapai, Pengetahuan Perempuan pun Hilang

Pemiskinan dan lenyapnya kehidupan masyarakat adat, perempuan suku Balik juga tergambar dari Kesaksian Bece’ (55 Tahun), saat sungai masih bisa dipakai, ia dan suaminya menggunakan sungai untuk mencari getah dari pohon Damar di Hutan dan daun Nipah di sepanjang Sungai.

Dengan pengetahuan dan keterampilan jenius warisan leluhurnya, Bece’ menganyam

atap nipah, “kalau banyak yang pesan, puluhan atap bisa sampai 5 sampai 8 hari menganyamnya,” ujar Bece’. Dari situ ia menjual 25 ribu rupiah tiap lembar atap daun nipah tersebut. Sementara getah Damar ia jual 2500 rupiah ke Kota Balikpapan, biasa digunakan mulai dari bahan campuran kosmetik, cat hingga aroma makanan. Namun sejak Sungai ditutup, pendapatannya juga hilang, selain itu, suaminya Udin (61 tahun) juga harus tinggal lebih lama di kebun atau ladang mereka untuk menghemat ongkos perjalanannya, tidak bisa leluasa bolak-balik berperahu lagi di Sungai.

GAMBAR 6, Sungai Sepaku yang ditutup beton pancang untuk proyek Intake Sepaku, sumber foto: ©JATAM Kalimantan Timur, 2022





GAMBAR 7, Bece' (55 tahun) Sedang Menganyam Daun Nipah untuk Atap Tradisional, Sumber foto; JATAM Kalimantan Timur, 2022

Pembangunan intake ini juga berdampak pada lingkungan hidup sekitar menjadi rusak, pohon-pohon buah dan ancaman digusur. Bece' merasa seperti ditipu karena dimintai tanda tangan kehadiran saat rapat lalu dianggap setuju untuk merelakan kebun dibelakang rumahnya yang berada di pinggir Sungai dipasang patok yang nantinya akan digusur untuk proyek ini. Pohon buah langsung, Rambutan dan Durian yang sudah ia tanam sejak dulu hanya diberi harga 4.000 rupiah yang bahkan tidak cukup untuk membeli 1 gelas kopi Starbucks, yang harganya 45 ribu rupiah. Lalu untuk tanah di halaman belakang yang bersebelahan dengan sungai, perusahaan kontraktor menawarkan hingga 70 ribu rupiah per-meter, begitu juga seluruh tanaman buah yang ada di atasnya.



GAMBAR 8, Dua perempuan Suku Balik yang berada di makam leluhur yang sebagian telah digusur di Sepaku Lama, Penajam Paser Utara, sumber foto: ©Nick Hannes

Pembangunan Bendungan Intake Sepaku juga menyebabkan masyarakat terpaksa memindahkan sekitar 35 makam leluhur Suku Balik yang sudah ada disana sejak 200 tahun lamanya. Perusahaan kontraktor ini memperlakukan makam-makam ini seperti barang yang bisa ditawarkan dan dibeli, menurut kesaksian Bece' biaya ganti dihargai hanya sekitar 15 juta tiap makam atau nisan.



GAMBAR 9:
Pengerahan sejumlah militer untuk pengaman jalur logistik laut Ibukota Baru, Sumber foto: Kompas.com

V. PERAN MILITER DI BALIK IBUKOTA BARU

MANTAN Panglima Tentara Negara Indonesia (TNI) Hadi Tjahjanto dilantik pada Juni 2022 sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang menjadi salah satu agendanya adalah memastikan lahan untuk IKN. Penunjukan Mantan Panglima TNI menggantikan Sofyan Djalil ini diduga guna memastikan keamanan saat proses pembebasan lahan agar tidak ada protes agar konsesi lahan untuk IKN berjalan mulus.

Pengamanan tahap awal pembangunan infrastruktur Ibukota Baru ini dilakukan oleh TNI AD dari Kodam VI/Mulawarman ber-

sama Kepolisian dari Polda Kalimantan Timur. Pengerahan dari aparat Kepolisian untuk memastikan keamanan mega proyek terlaksana tanpa ada gangguan dan protes. Kepolisian telah membentuk Satuan Tugas Operasi Nusantara Polisi Daerah (Polda) Kaltim yang terdiri dari beberapa Regu, melakukan patroli di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN).

Aparat ini diturunkan ke jalur distribusi material pembangunan Ibukota Baru untuk memastikan keamanannya, aparat keamanan bersenjata diturunkan berjaga mulai pelabuhan, sampai lokasi pembangunan.

Pengeralahan aparat keamanan dalam pembangunan Ibukota merupakan salah satu perintah Presiden Jokowi demi mempercepat proses pembangunan ibu kota negara baru di Sepaku. Hal tersebut dilaksanakan sebagai deteksi dini guna mengamankan lokasi pembangunan IKN dari ancaman eksternal. Mereka juga melakukan peninjauan titik batas Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang dilanjutkan dengan koordinasi bersama Bintara Pembina Desa (Babinsa) Kecamatan Sepaku untuk monitoring kondusifitas Kamtibmas di sekitar wilayah pembangunan Ibukota Baru.

Selain penggunaan aparat didalam operasi pembangunan Ibukota Baru, anggaran pengawalan atau pengendalian untuk desain sistem pertahanan Ibukota Baru Nu-

santara juga disodorkan yakni Rp 3,1 miliar dan pengawalan atau pengendalian desain sistem keamanan Ibu kota baru. Termasuk anggaran pengawalan atau pengendalian pembangunan infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi Ibukota Baru Nusantara sebanyak 4,08 miliar rupiah.

Mahfud MD, menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (Menko Polhukam) mengusulkan tambahan anggaran untuk biaya pengamanan pembangunan Ibukota Baru sebesar 24,3 miliar rupiah pada tahun 2023.

Selain itu wilayah markas TNI Angkatan Darat juga akan dibangun di Ibu Kota Baru Negara (IKN) Nusantara dengan luas mencapai 1.000 hektare, yang dibagi sesuai kebutuhan masing-masing satuan militer di beberapa kawasan Ibukota Baru ini.



GAMBAR 10 : Pos Induk Pengamanan Pembangunan Ibukota Baru di Kawasan Inti Pemerintahan . Sumber foto : ©Nick Hannes

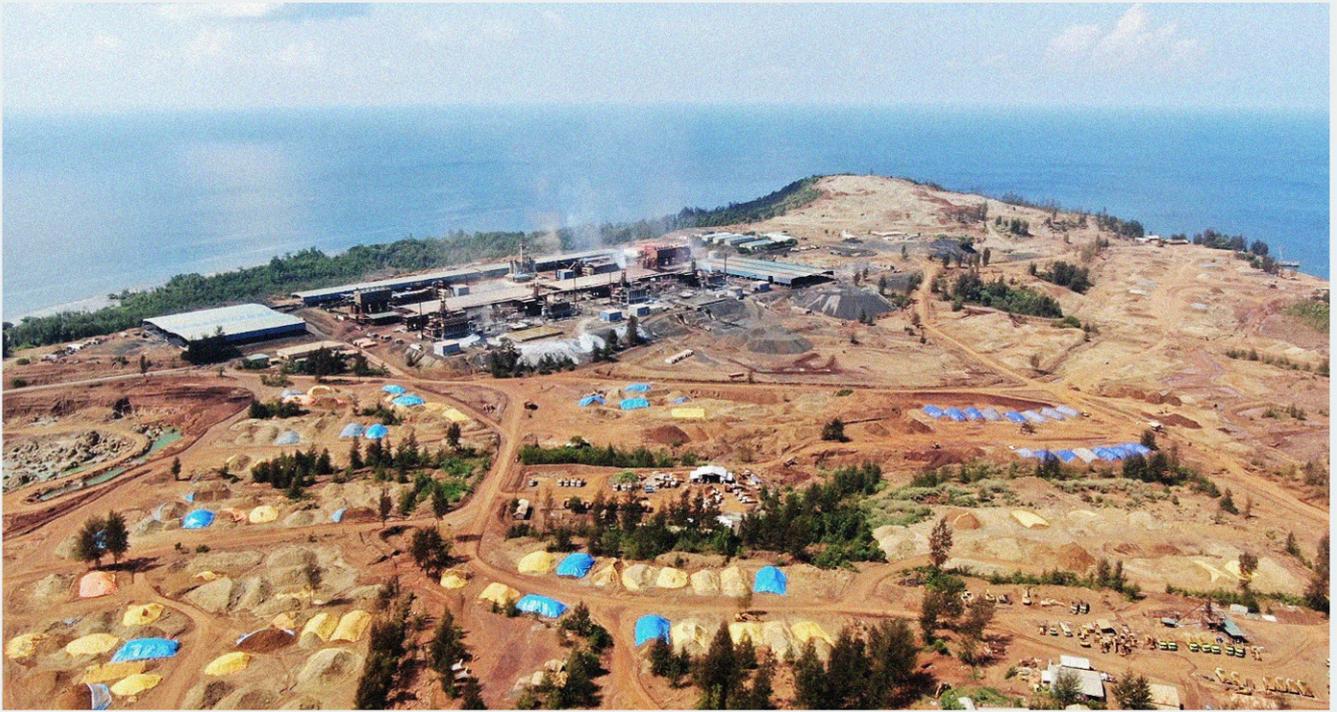
VI. DESAKAN DAN SERUAN

MEGAPROYEK Ibukota Baru bukan solusi hijau, sebaliknya Indonesia tidak membutuhkan Ibukota Baru melainkan Agenda Pemulihan atas krisis sosial ekologi yang saat ini terjadi pada bentang alam kepulauannya yang menyebabkan kekacauan dan bencana iklim

Keputusan pemindahan ibu kota negara baru Indonesia harus dibatalkan dan memprioritaskan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk pemenuhan kebutuhan dan hak dasar rakyat Indonesia

Negara-negara, Investor dan Lembaga-lembaga Keuangan harus menyelamatkan reputasinya dengan mengevaluasi keterlibatan dan menarik diri dari berbagai keterkaitan finansial pada Megaproyek Ibukota Baru ini.

Pembangunan Ibukota Baru ini telah menghancurkan bentang alam, menggusur ruang hidup masyarakat dan perempuan adat Suku Bali, menciptakan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia hingga bertabrakan dengan keadilan iklim.



Tambang Nikel dan PLTU di Pulau Kecil Gebe untuk kendaraan listrik
Foto : Jatam

